

# **PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT PESISIR PANTAI PASCA KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENGENTASAN KEMISKINAN DI KELURAHAN SOOP DISTRIK SORONG KEPULAUAN KOTA SORONG**

**Alwiarumatiga Alwiarumatiga<sup>1</sup>, Muh. Ridha Suaib<sup>2</sup>, Nur hidaya<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong Universitas, Indonesia

## **Abstrak**

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam pembangunan, untuk mengentaskan kemiskinan salah satunya dengan cara pemberdayaan masyarakat. Kelurahan Soop merupakan tergolong wilayah pesisir, dan rata-rata penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Umumnya masyarakat tergolongnya kedalam masyarakat yang kurang mampu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena mengatasi kemiskinan di Kelurahan Soop dan faktor penyebabnya di kelurahan Soop. Dalam penelitian adalah teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Kelurahan Soop masi banyak masalah kemiskinan.

**Kata kunci:** Perubahan Sosial, Kebijakan, Kemiskinan

## PENDAHULUAN

Peranan pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat tentu tidak terlepas dari otonomi khusus yang Mengacu kepada pasca penyelenggaraan pembangunan pemerintah yang dititik beratkan pada daerah kabupaten atau kota guna mempercepat pelayanan pemberdayaan terhadap kesejahteraan masyarakat. Di wilayah administrasi kota Sorong peranan pemerintah distrik mempunyai kedudukan sebagai kordinator dan Pembina penyelenggaraan pemerintah dari kepala kampung ke walikota, maka pemerintah distrik dan kelurahan sebagai pengendalian perumusan program-program pemberdayaan masyarakat.

Pengusulan program pemberdayaan masyarakat didasarkan pada potensi sumber daya alam dengan kualitas sumber daya manusia dan program yang di ajukan meliputi kesejahteraan sosial, pembangunan kesejahteraan dibidang ekonomi. Pemerintah distrik dalam pengusulan program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Keberhasilan peningkatan pemberdayaan masyarakat sebagai tolak ukur suksesnya pelaksanaan pembangunan daerah, oleh sebab itu pelaksanaan pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mengurus program yang berkaitan dengan kebijakan publik yang menyentuh masyarakat (Prasetyo, Z. N. D., Pabalik, D., & Bintari, W. C. (2017).

Peranan pemerintah terhadap pasca kebijakan merupakan upaya untuk menjamin hak-hak masyarakat dalam mengatur hidupnya dalam mendorong pemerintah untuk melindungi dan memfasilitasi masyarakat dalam memperoleh hakhak masyarakat. Pasca kebijakan juga merupakan upaya untukmenciptakan suatu iklim yang konduktif agar masyarakat dapat memperoleh dan memanfaatkan hak ekonomi sosial dan politik dengan sebaik –baiknya. Perubahan sosial melalui Pasca kebijakan berarti pula upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar masyarakat dapat memberdayagunakan sumber daya dari pemerintah dan potensi masyarakat secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan, martabat dan kebudayaannya dalam kehidupan masyarakat. Perhatian dan sasaran sekaligus sebagai pelaku utama pembangunan dengan memeperhatikan pokok-pokok kebijaksanaan tersebut, Pasca Kebijakan oleh pemerintah harus dipandang sebagai upaya, penanggulangan kemiskinan. Melalui koordinasi bermacam kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik ditingkat

Pusat maupun daerah dengan peningkatan sumber daya manusia sehingga secara efektif berdampak besar terhadap penanggulangan kemiskinan. Keberdayaan masyarakat adalah unsur yang memungkinkan suatu dapat bertahan(*survive*) dalam pengertian yang dinamis

mengembangkan diri dan mencapai suatu tujuan yang pasti, pemberdayaan masyarakat ini menjadi sumber penghasilan, sedangkan pasca kebijakan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dalam kondisi yang tidak berdaya untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan dengan kata lain kebijakan pemberdayaan adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam perubahan sosial. Yang terjadi karena kebijakan maka dengan ini Penulis ingin memperdalam masalah ini dengan memilih Perubahan Sosial Masyarakat Pesisir Pantai Terhadap Pasca Kebijakan Pemerintah Tentang Pengawasan Kemiskinan Di Kelurahan Soop Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong

## **METODOLOGI**

### **Tempat Dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian pada Kelurahan Soop Distrik Sorong Kepulauan. Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan mulai bulan Agustus sampai dengan November 2016

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini digunakan sebagai langkah metodis untuk memperoleh gambaran atas masalah yang diteliti secara lebih utuh dan mendalam. Jenis penelitian ini deskriptif dengan metode kualitatif bertujuan untuk merekonstruksi suatu fenomena dengan memeriksa latar belakang yang mendasarinya. Metode penelitian kualitatif juga merupakan prosedur penelitian yang berupaya mengumpulkan informasi, data dan fakta yang terkait dengan pokok masalah secara rinci dan cukup mendalam, sehingga diperoleh gambaran atas permasalahan secara lebih komprehensif. Dalam konteks ini laporan penelitian akan berisi pemaparan dan analisis data dan informasi yang terkumpul dari sumber primer dan sekunder. Sumber primernya akan diperoleh dari wawancara dengan masyarakat, pegawai, dll. Sumber sekunder diperoleh dari berbagai dokumen, buku, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber tercetak lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

### **Populasi Dan Sampel**

Populasi penelitian adalah staf Kelurahan Soop Distrik Sorong Kepulauan dan masyarakat kelurahan Soop. Sampel pengumpulan data adalah bagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti, pemilihan sampel dapat berkembang disesuaikan dengan kemampuan peneliti.

Sampel yang dipilih adalah masyarakat Kelurahan Soop di Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Observasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Soop Distrik Sorong Kepulauan kota Sorong. Untuk itu digunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara yang bersifat terbuka sehingga memberi kebebasan seluas-luasnya bagi informan untuk menyampaikan pendapat. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari, penelaan berbagai dokumen resmi, seperti data, peraturan-peraturan dan buku. Buku yang memiliki relevansi yang jelas dengan masalah yang hendak diamati. Penggunaan dokumentasi ini dimaksudkan untuk menjawab persoalan-persoalan tentang apa, kapan, dan bagaimana.

Sumber data yang didapat Penulis melalui data primer yaitu wawancara dengan pegawai di kantor Kelurahan Soop Distrik Sorong Kepulauan kota Sorong, serta masyarakat. Sedangkan sumber data sekunder, berupa literatur tentang peran dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Kelurahan Soop Distrik Sorong Kepulauan kota Sorong, jurnal ilmiah, serta sumber tercetak lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

### **Teknik Analisis Data**

Skripsi ini di analisis secara Kualitatif Deskriptif. Data yang berhasil di kumpulkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder diteliti kembali guna mengetahui kelengkapan data yang di peroleh, kejelasan rumusan maupun relevansinya bagi peneliti. Sehingga apabila terdapat kurang atau hal-hal yang kurang jelas dapat dilengkapi kembali. Analisa data pada tahap selanjutnya adalah untuk menyederhanakan data agar menjadi informasi yang dapat di gunakan dalam menjelaskan permasalahan penelitian. Setelah informasi cukup memadai langkah yang di lakukan untuk menganalisis data yaitu melakukan penyederhanaan informasi yang di peroleh dengan memilah-milah informasi berdasarkan kategori yang di siapkan dalam daftar wawancara dengan menggunakan teori-teori maupun pendapat yang disinggung dalam tinjauan pustaka sehingga dapat di tafsirkan untuk merumuskan kesimpulan penelitian yang berjudul Perubahan Sosial Masyarakat Pesisir Pantai pasca Kebijakan Pemerintah Tentang Pengatasan Kemiskinan Di Kelurahan Soop Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Perubahan Sosial Masyarakat Pesisir Pantai Pasca Kebijakan Pemerintah Tentang Pengentasan Kemiskinan dikelurahan Soop Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong.**

Kehidupan masyarakat pesisir adalah mereka yang hidup dan menetap dikawasan pesisir dan laut. Realita sosial masyarakat pesisir, menunjukkan gambaran tentang sebuah potret masyarakat yang relatif terbuka dan mudah menerima serta merespon perubahan yang terjadi. Hal ini dapat dimaklumi mengingat kawasan pesisir merupakan kawasan yang sangat terbuka dan memungkinkan bagi berlangsungnya proses interaksi sosial antara masyarakat setempat dengan masyarakat pendatang. Wilayah pesisir adalah interaksi antara tujuan-tujuan dan pemanfaatan-pemanfaatan kelautan dan darat, wilayah pesisir terdiri dari daratan yang berinteraksi dengan lautan dan ruang lautan yang berinteraksi dengan daratan.

Salah satu karakteristik masyarakat nelayan adalah ketergantungan yang kuat terhadap lingkungan pesisir. Baik dan buruknya lingkungan pesisir akan berdampak secara langsung terhadap mereka. Hal ini membentuk hubungan atau relasi timbal balik antara manusia dan alam. dan sistem kekerabatan masyarakat pulau soop yang tinggal dipesisir pantai masih sangat kental. dan itu menjadi salah satu hal utama mengapa masyarakat pulau soop selalu hidup rukun dan tidak pernah terjadi bentrok atau konflik yang berskala besar sistem kemasyarakatan yang terus terpelihara dan berjalan dengan baik sehingga saat ini adalah hidup bergotong royong dan menyelesaikan masalah atau menyelesaikan persoalan bersama-sama, musyawarah dan mufakat.

Berdasarkan uraian diatas maka hasil wawancara perubahan sosial masyarakat pasca kebijakan pemerintah.

Berikut ini adalah wawancara peneliti dengan nara sumber Bapak Saban Runsumbre Amd, IP, selaku kepala Kelurahan Soop, pada tanggal 16 November 2016

*“Penyebab terjadinya kemiskinan masyarakat pesisir kelurahan Soop karena masih banyak masyarakat pesisir kelurahan Soop yang bergantung hidupnya dari sumber daya laut namun modal usaha yang dimiliki relatif kecil dan alat tangkap yang digunakan masihpun bersifat tradisional”*

Wawancara dengan bapak Saban Runsumbre selaku lurah di kelurahan soop. Terkait perubahan sosial pasca kebijakan tentang pengentasan kemiskinan yakni:

*“Adapun perubahan masyarakat kelurahan Soop. pasca kebijakan pengentasan kemiskinan kami masih belum terlalu mampu misalnya dari sosial ekonomi dan*

*pendidikan kurang maju, ekonomi masih begitu rumit mereka lebih cenderung memanfaatkan alam. Selain itu sarana seperti mesti dari itu masih sangat luas yang tersentu. Perna dari sisi pendidikan sudah perubahan sedikit mampu dari anak-anaknya banyak yang bersekolah di kota sorong karena jumlah masyarakatnya makin bertambah yakni 1,115 jumlah penduduk 2016 (Soop pada tanggal 17 november 2016).*

Berdasarkan uraian diatas maka hasil wawancara perubahan sosial masyarakat pasca kebijakan pemerintah tentang pengentasan kemiskinan. Berikut ini adalah wawancara peneliti dengan marianke rayar selaku pegawai kelurahan Soop selaku masyarakat kelurahan Soop.

*“Pasca kebijakan pengentasan kemiskinan di kelurahan Soop. Perubahan yang saya lihat tidak begitu banyak, kemajuan perubahan sosial yang terjadi menurut saya itu lebih banyak di pengaruhi oleh Era modernisasi yang mana masyarakatnya sudah mulai menganggap pendidikan itu sangat di butuhkan, dan cara pergaulan masyarakat ini sudah mulai saling membantu dan masyarakat kita juga sudah mulai pintar untuk berdagang. (Soop pada tanggal 18 November 2016).*

Berikut ini adalah wawancara peneliti dengan RT II bapak Harun Indre.

*“Perubahan pasca kebijakan pengentasan kemiskinan itu sudah ada kenapa karna sarana dan prasarana seperti pembangunan sekolah bertambah yakni SD Yapis kelurahan Soop dan juga pembangunan puskesmas, walaupun menurut saya masih sangat kurang. Seharusnya pemerintah kota sorong lebih senring berkunjung di kelurahan kami. (Soop pada tanggal 19 November 2016).*

Kehidupan sosial masyarakat pesisir pantai kelurahan Soop, membawa suatu nuansa perubahan dalam masyarakat menjadi lebih meningkat baik dari segi sosial, ekonomi dan pendidikan inilah yang menjadi patokan dalam suatu perkembangan atau perubahan yang terjadi pada masyarakat pesisir. Untuk mengetahui kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir, ditinjau dari kehidupan sosial, sifat kerja sama masih nampak selain itu dari segi ekonomi pada masyarakat nelayan, kehidupan masyarakat pada saat itu masih menggunakan perahu dayung dan alat-alat nelayan yang digunakan pun masih sangat tradisional sehingga hasil tangkap mereka hanya dapat memenuhi kehidupan sehari-hari mereka. Dan sekarang masyarakat sudah beralih menggunakan perahu dengan mesin yang dapat menjangkau laut bebas sehingga hasil

tangkapan mereka lebih banyak dan mereka bias memenuhi kebutuhan lainnya terutama pendidikan bagi anak-anak mereka.

Kelurahan Soop merupakan daerah yang letaknya tepat di bagian pesisir pantai. Dengan berbagai perkembangan yang terjadi saat ini, yang menjadi permasalahan yang dihadapi masyarakat pesisir kelurahan Soop adalah beralihnya peralatan tradisional ke modern serta sistem kehidupan lainnya sebelum perubahan terjadi, pada umumnya masyarakat di wilayah pesisir masih sangat terbelakang, baik dari segi ekonomi, sosial, pendidikan dan politik. Sistem adat istiadat pun masih sangat terlihat dikalangan masyarakat, seperti tradisi gotong royong, pada pemerintahan yang sentralistik, kebanyakan masyarakat pesisir pantai kurang di perhatikan oleh pemerintah. Sehingga kemiskinan yang terjadi di masyarakat pesisir pantai sangat nampak, baik di bidang ekonomi, sosial dan pendidikan. Hal ini membuktikan bahwa ternyata sebelum perubahan, terjadi kemiskinan masyarakat nelayan di pesisir kelurahan Soop. Berbagai perubahan yang terjadi di kehidupan masyarakat pesisir pantai mengakibatkan masalah sosial ekonomi yang harus selalu di perhatikan oleh pemerintah. Seperti alat teknologi yang merupakan salah satu pendukung perkembangan atau perubahan yang berlangsung di masyarakat nelayan di kelurahan Soop saat ini. Oleh karena itu selayaknya pemerintah memperhatikan kebutuhan masyarakat pesisir pantai khususnya pada sarana penunjang dalam penangkapan ikan.

### **Kendala yang dihadapi masyarakat pesisir kelurahan Soop Pasca Kebijakan Pemerintah Tentang Pengawasan kemiskinan**

Masyarakat pesisir sering di identikan dengan masyarakat miskin. Di sebut miskin karena masih banyak masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya laut namun modal usaha yang di miliki relative kecil, hal ini yang mengakibatkan masyarakat pesisir khususnya kelurahan Soop hanya mendapatkan hasil ikan yang sangat minim. Belum lagi pekerjaam mereka sangat tergantung dengan alam. Sewaktu-waktu masyarakat nelayan berada pada lapisan bawah pelapisan sosial ekonomi ini mencerminkan bahwa penguasaan alat-alat produksi perikanan oleh karena itu pembinaan struktur sosial berdampak pada pengambilan hasil yang terjadi di kalangan yang menetapkan para pemilik perahu atau pedagang perantara/pedagang ikan memperoleh bagian atau keuntungan besar dari kegiatan tersebut, dianggap sebagai kewajaran pembagian tersebut di anggap sesuai dengan dengan kontribusi, biaya, resiko ekonomi, yang harus di tanggung dalam proses produksi dan pemasaran hasil

tangkapan. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan bapak Saban Runsumbre selaku kelurahan Soop.

*“Kendala yang masih kami hadapi itu yakni minimnya sarana dan prasarana seperti alat transportasi, alat untuk para nelayan, serta kurangnya sosialisasi tentang pemamfaat sumberdaya laut yang baik dan damai, serta perubahan sosial menciptakan preode yang kreatif terkait dengan sumberdaya laut, (Soop pada tanggal 20 November 2016).*

Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan Ibu Marianke Rayar

*“Tanda yang pemerintah bisanya yang ada di Kota Sorong masih sangat kurang perhatian terhadap masyarakat yang ada di kelurahan Soop, misalnya dana bantuan sekolah itu sangat minim untuk anak-anak yang ada di kelurahan Soop kalau kunjungan itu sangat jarang sekali (Soop pada tanggal 21 November 2016).*

Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan salah satu warga nelayan dikelurahan Soop.

*“Sekarang ini harga ikan masih sangat rendah harga jual per kg seharga 35 ribu rupiah dan harga jual yang kami dapat belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak kami maupun kebutuhan hidup sehari-hari, kami harap kepada pemerintah khususnya pemerintah perikanan agar lebih memeperhatikan lagi harga jual ikat agar bisa memenuhi kebutuhan hidup kami para nelayan (Soop pada tanggal 22 November 2016).*

Seperti yang telah di gambarkan kehidupan masyarakat pesisir di kelurahan Soop, tidak hanya kemiskinan yang di alami karena dampak struktur dan natural namun juga kultur masyarakat pesisir yang menjadi salah satu penyebab kemiskinan. penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan peningkatan pendapatan masyarakat miskin atau dengan mengurangi beban kebutuhan dasar mereka, peningkatan dapat dilakukan dengan bantuan sosial atau peningkatan peran serta masyarakat miskin dalam kegiatan ekonomi. Dalam mengurangi beban pengeluaran mereka dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti pendidikan, kseehatan dan peningkatan akses terhadap kebutuhan masyarakat miskin. Kita ketahui bahwa masyarakat nelyan secara umum memiliki pola hidup yang sangat berbeda-beda bila dibandingkan dengan masyarakat yang lain. Hal ini ditandai dengan minimnya akses produksi, minimnya permodalan kekurangan fasilitas melaut serta dipengaruhi oleh faktor sosial budaya tradisi yang diwariskan

oleh nenek moyang mereka secara turun- turunan. Masalah kemiskinan bukan hal yang baru bagi kita dari program pengatasan kemiskinan telah dirancang oleh para pembuat kebijakan untuk kemiskinan yang semakin besar pemerintah tersebut bertujuan untuk mengurangi kemiskinan secara keseluruhan, namun yang menjadi permasalahan adalah keefektifitasan program dalam mengurangi kemiskinan masi kurang efektif kritik terhadap program pengatasan kemiskinan yang diberikan oleh pemerintah rata-rata sifat membuat masyarakat menjadi positif, hal yang perlu dirubah dalam upaya pengatasan kemiskinan perlu melibatkan masyarakat secara langsung dalam arti masyarakat sebagai ubjek pelaksanaan program pengatasan kemiskinan, komposisi yang tepat dalam pelaksanaan program pengatasan kemiskinan selain melibatkan pemerintah dalam masyarakat setemat perlu adanya keterlibatan instansi terkait pada dasarnya strategi pengatasan kemiskinan dapat diatasi dengan peran pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat setempat.

Fungsi dari strategi ini adalah saing melengkapi kekurangan satu sama lain dengan alasan tidak semua upaya dapat dilakukan secara mandiri seluruhnya oleh masyarakat tetap masi diperlukanya pihak luar sebagai pendukung program yang dititik beratkan dalam strategi pengatasan kemiskinan ini masyarakat dapat mandiri berdaya setelah terlepas dadi bantuan pemerintah atu instansi yang terlibat, masyarakat secara kreatif dan aktif mengembangkan program yang diberikan oleh pemerintah agar individu dalam masyarakat dapat yang dapat digunakan bertahan dan dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Didalam proses berlangsungnya pengatasan kemiskinan perlu adanaya suatu monitoring dan evaluasi agar berjalan sesuai dangan prosedur yang telah ditetapkan sehingga program pemngatasan kemiskinan memilki dampak yang cukup signifikan dalam pengurangan angka kemiskinan masyarakat pesisir keluraha Soop. Dalam pelaksanaan kebijakan pengatasan kemiskinan, oleh karena itu semua aspek harus dipertimbangkan secara matang-matang. Harus bisa memanfaatkan kondisi yang ada, dalam hal ini yang ditunjuk dalam pelaksanaan rogram pengatasan kemiskinan harus bisa dikeordinasikan dan merangkul semua elemem terkait dikecamatan, kelurahan dan tokoh masyarakat.Hali ini sangat perlu dilakukan agar bisadiketahui program tersebut sesuai aspirasi masyarakat agar pelaksanaan program bisa berjalan degan lancer

## **Upaya pemerintah dalam pengatasan kemiskinan di Kelurahan Soop Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong**

Berbagai upaya Pemerintah telah dilakukan pemerintah Kota Sorong untuk menanggulangi kemiskinan khususnya untuk masyarakat pesisir, untuk itu pemerintah Kota Sorong telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan khususnya untuk masyarakat pesisir, akan tetapi hasil survei memperlihatkan bahwa masyarakat nelayan masih merupakan masyarakat penyumbang angka kemiskinan cukup besar di Indonesia masyarakat pesisir kita seharusnya dapat hidup lebih sejahtera dengan sumberdaya alam yang luar biasa tersebut, namun karena aspek-aspek tertentu nasib nelayan kita seakan berjalan ditempat.

Beberapa aspek yang menyebabkan terpeliharanya kemiskinan nelayan atau masyarakat pesisir, beberapa aspek tersebut adalah mata pencaharian yang sangat tergantung pada musim, tingkat pendidikan yang masih rendah, kebiasaan atau pola hidup nelayan yang konsumtif, dan peralatan tangkap yang digunakan masih sangat sederhana. Dalam hal ini permasalahan, tidak semua daerah memiliki pelelangan ikan dan ini menjadi hambatan bagi nelayan. Bantuan provinsi Papua Barat berupa perahu fiber, perahu longbood dan motor temple kepada 6 kabupaten dan 1 Kota Gubernur Provinsi Papua Barat O. Atururi menyerahkan bantuan hibah pengadaan perahu fiber dan motor temple 15 pk untuk kelompok masyarakat di 6 kabupaten dan 1 Kota, bantuan perahu longbood dan motor temple 40 pk juga akan di berikan kelada distrik di 6 kabupaten penyerahan bantuan berlangsung Jumat ( 19/8) Kemarin dipelabuhan perikanan Sorong. Penyerahan disaksikan oleh jajaran pemerintah provinsi Papua Barat, asisten III setda Kota Sorong, Wadanlatmal XIV forum komunikasi pimpinan daerah di lingkungan pemerintah Kota Sorong.

Bantuan tersebut diserahkan untuk merangsang, menghidupkan dan merupakan bagian dari kegiatan pemberdayaan kelompok nelayan dan kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya diwilayah pesisir sebagai alat transportasi dalam menunjang operasional pemerintah distrik sehingga kegiatan pelayanan masyarakat dapat terlaksana secara maksimal sehingga kekampunkamung diharapkan dengan adanya bantuan tersebut dapat mengurangi kemiskinan yang saat ini menjadi perhatian utama dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota sehingga dapat pada berkelanjutan pertumbuhan ekonomi diwilayah pesisir dan distrik. Gubernur provinsi Papua Barat juga berpesan kepada para penerima bantuan agar menggunakan

bantuan secara baik dan bertanggung jawab sehingga terjadi peningkatan aktifitas masyarakat pesisir dan distrik baik berupa penangkapan dan penjualan ikan dan usaha ekonomi lainnya.

Adapun bantuan pemerintah provinsi Papua Barat melalui APBD badan pemberdayaan masyarakat tahun anggaran 2016 berupa bantuan perahu fiber dan motor tempel 15 PK bagi masyarakat pesisir lokal Papua Kabupaten dan Kota jumlah 235 Unit dengan rincian untuk Kota Sorong diberikan sebanyak 25 unit, sementara Manukwari, Raja Ampat, Sorong Selatan, Teluk Bintuni, Kaimana dan Manukwari Selatan masing-masing diberikan sebanyak 35 Unit. Bantuan untuk kepala distrik pada 6 kabupaten diberikan sebanyak total 25 Unit, diantaranya bantuan Longboat untuk distrik Raja Ampat sebanyak 5 Unit, untuk Sorong Selatan, Fakfak, Teluk Bintuni, Kaimana, dan Teluk Wondama diberikan masing-masing sebanyak 4 unit Longboat. Sementara bantuan fasilitas usaha untuk masyarakat pesisir diberikan perahu fiber dan motor katinting kepada Kabupaten Sorong sebanyak 30 unit dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga berpesan agar bantuan tersebut dimanfaatkan dengan rasa tanggung jawab dan juga menyimpan atau menjualnya untuk keperluan keluarga sendiri karena menerima bantuan ini merupakan hasil koordinasi antara badan pemberdayaan masyarakat provinsi Papua Barat dengan beberapa instansi lain yang terkait dengan proposal bantuan yang sudah pernah diterima.

Ujaran Gubernur provinsi Papua Barat, harap saya agar kelompok penerima dapat memanfaatkan hal ini secara baik untuk perbaikan peningkatan ekonomi keluarga dan ekonomi bagi masyarakat khususnya yang berada di wilayah pesisir. Masalah kemiskinan dianggap salah satu hal yang menghambat proses pembangunan di masyarakat Kelurahan Soop. Salah satu yang dibelit oleh masalah sosial salah satunya adalah Indonesia, angka kemiskinan ditingkat masyarakat masih cukup tinggi. Meskipun oleh lembaga statistik, selalu dinyatakan bahwa setiap tahun angka kemiskinan cenderung menurun. Kemiskinan merupakan masalah pemerintahan yang ada di dunia ini. Ia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Faktor tersebut antara lain tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan, akses barang dan jasa, lokasi geografi, gender dan kondisi lingkungan.

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menuju kehidupan yang lebih bermartabat. Oleh karena itu, kemiskinan wajib untuk ditanggulangi, sebab tidak ditanggulangi akan dapat mengganggu pembangunan nasional. Dalam konteks ini, beberapa upaya telah dilakukan pemerintah Kota Sorong adalah dengan menggerakkan sektor riil, beberapa kebijakan yang menyangkut sektor ini seperti program

KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Upaya strategi yang dapat dilakukan dalam rangka UMKM antara kondusif bagi pengembangan UMKM meliputi regulasi dan perlindungan usaha. Kedua menciptakan sistem penjaminan bagi usaha mikro, ada juga pelaksanaan bantuan di bidang kesehatan yaitu jaminan kesehatan masyarakat atau jamkesmas, namun kedua hal tersebut tidak dampak signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan.

Langkah mengatasi masalah kemiskinan. Untuk itu kiranya pemerintah perlu melakukan ketegasan dan kebijakan yang lebih membumi dalam rangka menyelesaikan kemiskinan ini. Beberapa langkah yang bisa dilakukan diantaranya adalah: Menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Karena pengangguran adalah salah satu sumber penyebab kemiskinan. Memberikan subsidi pada kebutuhan pokok manusia, sehingga setiap masyarakat bisa menikmati makanan yang berkualitas. Hal berdampak pada meningkatnya angka kesehatan bagi masyarakat. Menghapuskan korupsi, sebab korupsi adalah salah satu penyebab layanan masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal inilah kemudian menjadikan masyarakat tidak menikmati hal sebagai warga Negara sebagaimana mestinya. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Fokus program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok utama selain beras.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Perekonomian yang rendah menyebabkan mobilitas penduduk yang rendah, karena umumnya masyarakat berpegangan walaupun dalam kurang waktu satu bulan. Sarana komunikasi yang menghubungkan Pulau Soop dengan daerah lain berupa Telephon, satelit, itu belum ada sedangkan sarana informasi masyarakat berupa radio dan Televisi yang hanya dimiliki beberapa orang / warga karena selain harus memakai antena parabola juga ketersediaan listrik tenaga surya pada malam hari antara pukul 18.00-00. WIT. Terbatasnya aksesibilitas komunikasi dan transportasi merupakan salah satu ketertinggalan masyarakat dalam pembangunan di Pulau Soop.

Hal ini dikarenakan warga kurang memiliki kreasi dan ketrampilan dalam persaingan hidup bermasyarakat. Mayoritas masyarakat di Kelurahan Soop bermata pencaharian sebagai

nelayan, karena kondisi geografisnya sebagai wilayah pulau dan pesisir di Kota Sorong. Jika dipersentasikan 90% sebagai nelayan tradisional. Jika dipersentasikan sebagai nelayan tradisional secara umum terdapat tiga jenis mata pencaharian penduduk di pulau Soop yaitu : jual kelapa kering, sapu lidi dan kelapa muda. Namun disamping itu mata pencaharian pokok tersebut, penduduk juga mempunyai mata pencaharian sampingan seperti berkebun dan nelayan.

Pada umumnya masyarakat memasarkan pada para pengepul yang ada di pulau Soop sehingga hanya memperoleh untung sedikit. Dibandingkan jika langsung di bawah ke kota Sorong, untung yang di peroleh lebih besar, namun harus mengeluarkan ongkos angkut yang lebih besar. Karena kesulitan yang lain adalah jika cuaca hujan berhari-hari maka penjualan kelapa akan terhambat; Kendala yang dihadapi masyarakat pesisir di kelurahan Soop, tidak hanya kemiskinan yang di alami karena dampak struktur dan natural namun juga kultur masyarakat pesisir yang menjadi salah satu penyebab kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan peningkatan pendapatan masyarakat miskin atau dengan mengurangi beban kebutuhan dasar mereka, peningkatan dapat dilakukan dengan bantuan sosial atau peningkatan peran serta masyarakat miskin dalam kegiatan ekonomi. Dalam mengurangi beban pengeluaran mereka dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti pendidikan, kesehatan dan peningkatan akses terhadap kebutuhan masyarakat miskin. Kita ketahui bahwa masyarakat nelayan secara umum memiliki pola hidup yang sangat berbeda-beda bila dibandingkan dengan masyarakat yang lain.

Beberapa aspek yang menyebabkan terpeliharanya kemiskinan nelayan atau masyarakat pesisir, beberapa aspek tersebut adalah mata pencaharian yang sangat tergantung pada musim, tingkat pendidikan yang masih rendah, kebiasaan atau polah hidup nelayan yang konsumtif, dan peralatan tangkap yang digunakan sangat sederhana. Upaya yang telah dilakukan pemerintah Kota Sorong untuk menanggulangi kemiskinan khususnya untuk masyarakat pesisir, untuk itu pemerintah Kota Sorong telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan khususnya untuk masyarakat pesisir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict, 1991 *Imagined Community : reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, Verso : London.
- Basari, Hasan / Bernhard Dahm, 1987. *Sukarno dan perjuangan kemerdekaan*, : LP3ES. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Depdagri, 2004. *Pembangunan Politik Dalam Negeri Guna Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Demi Utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia*.
- Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Depdagri, 2005 *Modul Pemantapan Budaya Politik*.
- Urkheim, Emile (et.al.), 1964. *Essay on Philosophy and Sociology*, Harper Books.
- Dahl, Robert A., 1982. *Dilemmas of Pluralist Democracy: Autonomy vs Control*, Yale University Press.
- Gonggong, Anhar dalam “Diskusi Terbatas,” “*Perspektif Sejarah atas Demokrasi Indonesia*,” 11 September 2002, di Bappenas, oleh Direktorat Politik, Komunikasi dan Informasi.
- Huntington, Samuel P. 1991. *Democracy’s Third Wave*, dalam *Journal of Democracy*, Spring.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1994. “*Pembangunan Nasional dan Wawasan Kebangsaan*” Makalah disampaikan pada Sarasehan Nasional Wawasan Kebangsaan di Jakarta.
- Linz, Juan J. dan Alfred Stepan, 2001. *Mendefinisikan dan Membangun Demokrasi*, dalam “Menjauhi Demokrasi Kaum Pemnajah”, Ikrar Nusa Bhakti dan Riza Sihbudi (ed.), : Mizan, Bandung.
- Parsons, Talcott. 1951. *Toward a General Theory of action*. New York : Harper & Row,. New York.
- Prasetyo, Z. N. D., Pabalik, D., & Bintari, W. C. (2017). Implementasi Alokasi Dana Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Malawele Kabupaten Sorong. *Gradual*, 6(2), 42-53.
- Sudarsono, Juwono, (Ed.), 1994. *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik*, Gramedia : Jakarta.